BAB I

PENDAHULUAN

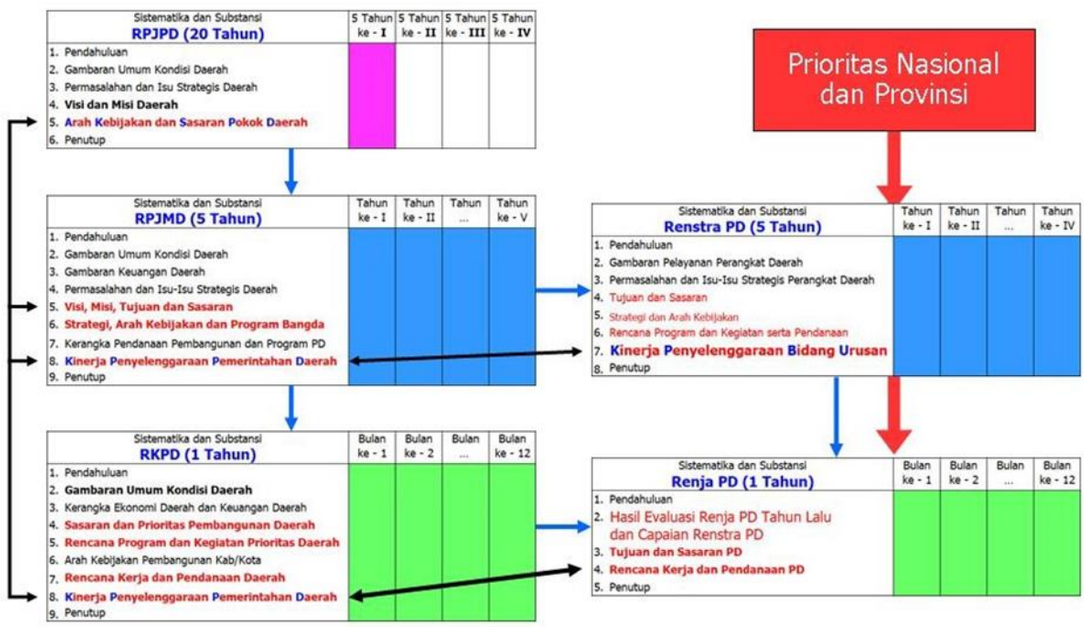
1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalahan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial dapat menerjemahkan visi, misi dan Program Organisasi Perangkata Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra) Instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencan kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk dievaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah . Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 merupakan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

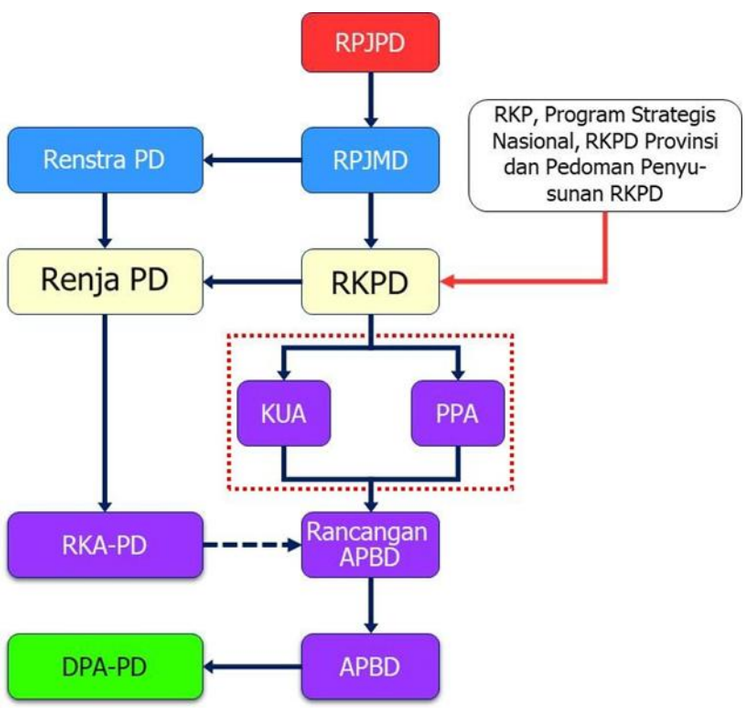


Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Maanggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahab Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2025-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 (Renja) ini adalah memberi gambaran mengenai arah kebijakan, program kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Manggarai Timur.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- Untuk mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tersususn dalam perencanaan Perangkat Daerah;
- Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan pada Program/kegiatan/sub kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
- Untuk menjamin kesesuain kegiatan/sub kegiatan lanjutan maupun kegiatan/sub kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bagian serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Untuk menjadi bahan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
- Untuk menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) tahun 2025.

1.4 sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1 Maksud
  - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkata Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
  - 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENNUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkata Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Darah Sekretariat DPRD s/d Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. BELANJA LANGSUNG

1. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;** mendukung kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD

❖ **Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

Indikator : Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah
Target : 3 Dokumen
Realisasi : 0 (0%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai penyusunan dan pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah.

❖ **Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda**

Indikator : Jumlah perda yang dibahas
Target : 7 Dokumen
Realisasi : (82 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.039.807.600,-. Realisasi sebesar Rp. 848.277.717,- atau sebesar 82 %. Sisa anggaran sebesar R191.529.883,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai rangkaian kegiatan pembahasan rancangan perda dan perjalanan dinas luar kota ADPRD dalam rangka konsultasi dan asistensi Perda.

❖ **Sub kegiatan Penyelenggaraan kajian Peundang-Undangan**

Indikator : Jumlah dokumen hasil kajian perundang-undangan
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 0 Dokumen (0%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 500.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan kajian perundang-undangan. Realisasi Rp. 0,- atau capaian sebesar 0%.

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

❖ **Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan KUA dan PPAS
Target : 6 Dokumen
Realisasi : 6 Dokumen (99.9 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 67.500.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 67.435.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 65.000. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan KUA dan PPAS.

❖ **Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
Target : 6 Dokumen
Realisasi : 6 Dokumen (97.50 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 60.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- Sisa anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-.. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

❖ **Sub kegiatan Pembahasan APBD**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan APBD
Target : 6 Dokumen
Realisasi : 6 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.500.000 Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan APBD.

❖ **Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan Perubahan APBD
Target : 6 Dokumen
Realisasi : 6 Dokumen (80 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20.000.000 ,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000. Sisa anggaran sebesar Rp 4.000.000 -. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan Perubahan APBD.

❖ **Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan laporan semester
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 2.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.0,. Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.000.000, Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai akomodasi kegiatan pembahasan laporan semester .

❖ **Sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**

Indikator : Jumlah dokumen pembahasan laporan semester
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.30.000.000-. Realisasi anggaran sebesarRp 29.700.000,- atau sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 300.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai akomodasi kegiatan Pembahasan LKpj, Honorarium Pansus LKPJ, dan Perjalanan Dinas dalam Kota dalam Rangka pemantauan lapangan atas LKPj Bupati.

c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**

Indikator : Jumlah laporan rapat kerja DPRD terkait Bidang Pemerintahan dan Hukum
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.500.000,-. Realisasi sebesar Rp 0,- atau sebesar 0%Sisa anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ;**

Indikator : Jumlah Laporan Rapat Kerja DPRD terkait bidang infrastruktur
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (0 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.500.000-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat dan perjalanan dinas dalam kota untuk Pansus pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;**

Indikator : Jumlah Laporan Pansus DPRD terkait Bidang Kesejahteraan rakyat
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (0 %)
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.500.000,-. Realisasi sebesar Rp.2.500.000,- atau sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat dan Pansus terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan rakyat.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;**

Indikator : Jumlah laporan rapat kerja DPRD terkait Bidang Perekonomian
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;**

Indikator : Jumlah laporan Pansus DPRD terkait Bidang Sumber Daya Alam

Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp2.500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp 2.500.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Pansus terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam.

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Indikator : Jumlah Dokumen pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan keuangan oleh BPK yang tersedia
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran senilai Rp.25.500.000, realisasi Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini sudah dilaksankan bersamaan dengan kegiatan laian yang menghadirkan Badan Keauangan sehingga biaya makan dan minum tidak terserap

❖ **Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran**

Indikator : Jumlah Dokumen pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan keuangan oleh BPK yang tersedia
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.500.000,-. Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat kerja terkait pengawasan penggunaan anggaran. Kegiatan ini sudah dilaksankan tapi anggaran tidak terserap karena bersamaan dengan kegiatan terkait seperti pada saat pembahasan KUAPPAS Perubahan yang dalam pembahasan diminta pertanggungjawaban pengguna anggaran terkait serapan anggaran triwulan.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah**

Indikator : Jumlah Dokumen yang tersedia
Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 143.494.800,-. Realisasi sebesar Rp. 106.248.100,- atau sebesar 74%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rapat kerja terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah. Kegiatan ini sudah dilaksankan .

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

❖ **Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD**

Indikator : Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD
Target : 30 Orang
Realisasi : 30 Orang(100 %)

Anggaran yang tersedia senilai Rp 853.280.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp.681.424.508,- atau 80 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 881.500,-. Anggaran ini dimaksud untuk membiaya kegiatan bimbingan teknis DPRD, tapi tidak ada anggaran.

❖ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**

Indikator : Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat yang dilaksanakan
Target : 5 Laporan
Realisasi : 5 Laporan (100 %)

Anggaran yang disediakan senilai Rp. 7.500.000,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.7.000.000,- atau 99 %, sisa anggaran sebesar Rp.500.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Sub Bagian Humaspro, serta membiayai kegiatan hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Agama/pendididkan.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD**

Indikator : Jumlah dokumen program kerja DPRD yang tersusun
Target : 1 Laporan
Realisasi : 1 Laporan (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.3.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyusunan program kerja DPRD. Anggaran tidak terserap karena dilaksanakan bersamaan penyusunan Banmus

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

❖ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses**

Indikator : Jumlah pelaksanaan Reses
Target : 90 Laporan
Realisasi : 89 Laporan (98.57%)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.447.200.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.426.955.000,- atau sebesar 98,57 %. Sisa anggaran sebesar Rp.20.245.000 Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Reses DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Indikator : Jumlah kunjungan kerja DPRD yang dilaksanakan
Target : 351 Laporan
Realisasi : 200 Laporan (68 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 467.125.000,-. Realisasi anggaran Rp. 385.890.000,- atau 83%. Sisa anggaran sebesar Rp 271.455.000 ,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiaayai honorarium THL Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, pendampingan monitoring dan membiayai kegiatan monitoring serta kegiatan menghadiri undangan DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Indikator : Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun
Target : 1 Laporan
Realisasi : 1 Laporan (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.592.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. atau sebesar 0%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD. Kegiatan penyusunan pokir dilaksanakan, tapi tidak ada penyerapan anggaran makan minum.

f. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**

Indikator : Jumlah dokumen risalah rapat paripurna yang tersusun
Target : 55 Dokumen
Realisasi : 55 Dokumen (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 323.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 322.200.000,- atau sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 800.000,-. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD**

Indikator : Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun
Target : 1 Laporan
Realisasi : 1 Laporan (100 %)
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.350.000,-. Realisasi sebesar 0.- atau sebesar 0%. Anggaran ini di maanfaatkan untuk membiayai Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.

❖ **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**

Indikator : Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun
Target : 1 Laporan
Realisasi : 1 Laporan (100 %)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp1.750.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- atau sebesar 100%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah.

❖ **Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**

Indikator : Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun
Target : 1 Laporan
Realisasi : 1 Laporan (100 %)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi anggaran senilaia Rp. 17.900.000 atau 100%, sisa anggaran Rp.100.000. untuk membiayai kegiatan fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang menjadi penunjang kelancaran pelayanan tugas dan fungsi DPRD yakni :

1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Indikator : Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD
Target : 14 Bulan
Realisasi : 14 Bulan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.061.264.736 dengan realisasi senilai Rp. 11.622.169.192,- atau sebesar 100 % dengan sisa anggaran Rp. 439.095.544,-. Anggaran ini diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD.

- Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

  Indikator : Jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
  Target : -
  Realisasi : -

  Sub Kegiatan ini memiliki total Anggaran sebesar Rp. 480.000.000 dengan realisasi Rp 478.050.000,- atau 100%. Sub Kegiatan ini dianggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan Atribut DPRD.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up

  Indikator : Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medicak check up
  Target : 30 Orang
  Realisasi : 9 orang (30%)

  Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.605.100,- atau 30% dengan sisa anggaran Rp. 63.394.900. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan medical check up DPRD

2. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

- Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

  Indikator : Jumlah laporan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
  Target : 178 Laporan
  Realisasi : 128 Laporan (100%)

  Anggaran yang tersedia Rp. 2.775.740.000,- dengan realisasi Rp. 2.485.915.259,- atau 90% dengan sisa anggaran senilai Rp. 289.824.741,-. Anggaran ini digunakan dalam rangka mefasilitasi koordinasi dan konsultasi DPRD luar kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

  Indikator : Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD

  Target : 12 Bulan
  Realisasi : 12 Bulan (100%)

  Anggaran tersedia Rp. 780.000.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 630.000.000 atau 81 %, sisa anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Anggaran ini di gunakan untuk kegiatan penyedian kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD.

g. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

  Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Target : 12 Bulan
  Realisasi : 12 Bulan (100%)

  Anggaran tersedia Rp. 65.708.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 65.040.000 atau 99 %, sisa anggaran sebesar Rp. 668.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

  Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iklisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan iklisar realisasi kinerja SKPD
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 500.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %, sisa anggaran sebesar Rp. 500.000

h. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Indikator : jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Target : 14 Bulan
Realisasi : 14 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 1.414.215.510 dengan realisasi angaran sebesar Rp. 1.189.308.677 atau 84 %, sisa anggaran sebesar Rp. 224.906.833.

❖ Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Indikator : jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Target :12 Bulan

Realisasi :12 Bulan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 593.442.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.362.004 atau 78 %, sisa anggaran sebesar Rp. 129.822.158.

❖ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Indikator : jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Target : 3 dokumen

Realisasi : 3 dokumen (100%)

Anggaran tersedia Rp. 3.199.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 100 %.sisa anggaran sebesar Rp. 3.199.750.

i. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

❖ Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

Idikator :jumlah penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah

Target :1 Laporan

Realisasi :1 Laporan (100%)

Anggaran tersedia Rp. 2.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 100 %, sisa anggaran sebesar Rp.2.500.000.

j. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

❖ Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Indkator :jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Target :10 paket

Realisasi : 10 Paket (100%)

Anggaran tersedia Rp. 14.999.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.999.000 atau 100 %, sisa anggaran sebesar Rp. 0.

❖ Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Indikator : jumlah penyediaan bahan logistik kantor

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan (100%

Anggaran tersedia Rp. 85.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000 atau 100% ,sisa anggaran sebesar Rp.0.

❖ Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator : jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan (100%

Anggaran tersedia Rp. 61.736.050 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.614.250 atau 93.78% ,sisa anggaran sebesar Rp. 0.

❖ Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator : jumlah fasilitas Kunjungan Tamu

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan (100%

Anggaran tersedia Rp. 5.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.213.750 atau 100% ,sisa anggaran sebesar Rp.0.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator : jumlah fasilitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%

Anggaran tersedia Rp. 258.234.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 256.960.889 atau 98.07% ,sisa anggaran sebesar Rp.1.273.111,-

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%
Anggaran tersedia Rp. 17.499.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.404.500 atau 100% ,sisa anggaran sebesar Rp.95.300,-

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%
Anggaran tersedia Rp. 104.402.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.882.208 atau 76% ,sisa anggaran sebesar Rp.23.519.792,-

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%
Anggaran tersedia Rp. 48.590.960 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.590.960 atau 100 % ,sisa anggaran sebesar Rp.0.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%
Anggaran tersedia Rp. 9.995.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.995.500 atau 100 % ,sisa anggaran sebesar Rp.0.

l. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Target : 12 Bulan
Realisasi : 12 Bulan (100%
Anggaran tersedia Rp. 125.700.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.360.000 atau 90.33 % ,sisa anggaran sebesar Rp.8.339.750.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional

  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional
  Target : 12 Bulan
  Realisasi : 12 Bulan (100%
  Anggaran tersedia Rp. 66.620.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.631.127 atau 92.02 % ,sisa anggaran sebesar Rp.5.98.873,-

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya

  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
  Target : 12 Bulan
  Realisasi : 12 Bulan (100%
  Anggaran tersedia Rp. 14.920.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.100.000 atau 95.67 % ,sisa anggaran sebesar Rp.820.000

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Target : 12 Bulan
  Realisasi : 12 Bulan (100%
  Anggaran tersedia Rp. 722.495.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 570.750.000 atau 90.17 % ,sisa anggaran sebesar Rp.151.745.000

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

  Indikator : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Target : 12 Bulan
  Realisasi : 12 Bulan (100%
  Anggaran tersedia Rp. 25.010.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.318.770,- atau 98.13 % ,sisa anggaran sebesar Rp.691.230,-

Dari program dan kegiatan tersebut di atas, terdapat beberapa point evaluasi yakni sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat menjawab salah satu Fungsi DPRD yakni Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Manggarai Timur, baik Perda inisiatif, Perda regular maupun Perda usulan. Capaian kegiatan ini sebesar 72.73 %. Terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang tidak mencapai 100% yakni :

- **Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

  Penyusunan dan pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah yakni Pembahasan Perda Inisiatif PDAM tidak terealisasi karena tidak dianggarkan pada DPA Perubahan.

❖ **Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda**

Realisasi Dokumen menghasilkan 6(enam) dokumen dari target 6 (enam) dokumen atau 100 %. Terdapat 2(dua) dokumen yang tidak teralisasi yakni perda inisiatif DPRD dan Perda Usulan dari eksekutif.

❖ **Sub kegiatan Penyelenggaraan kajian Peundang-Undangan**

Sub Kegiatan ini belum menghasilkan dokumen kajian perundang-undangan yakni Dokumen Pemekaran Kecamatan madih dalam proses dan Dokumen Retribusi dan Pajak juga sedang dalam proses.

❖ **Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik**

Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Realisasi sebesar Rp. 0,- Sub Kegiatan ini menghasilkan 2 (dua) dokumen naskah akdemik.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;

Kegiatan ini mendukung kegiatan pertama sebagai tahapan yang harus dilewati, dimana kegiatan ini merupakan salah satu fungsi DPRD yakni fungsi anggaran. Dari tahapan ini akan terbentuk Perda reguler yang berkaitan dengan penganggaran daerah.

Pada tahun 2023 kegiatan ini meliputi:

a) Pembahasan KUA dan PPAS
b) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
c) Pembahasan APBD
d) Pembahasan APBD Perubahan
e) Pembahasan Laporan Semester
f) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pada kegiatan ini, semua sub kegiatan telah berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu maka realisasi untuk kegiatan ini adalah 100 Persen

2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menonjolkan fungsi pengawasan dari DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh tugas DPRD. Terdapat bebrapa sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengawasan yaitu:

a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum, target tercapai 100 Persen.

b) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur , target tercapai 100 Persen.

c) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat,
, target tercapai 100 Persen.

d) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian , target tercapai 100 Persen

e) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, telah terlaksana dengan capaian 100 Persen.

f) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah terlaksana dengan capaian 100 Persen.

g) Pengawasan Penggunaan Anggaran telah terlaksana dengan capaian 100 Persen.

h) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, telah terlaksana dengan capaian 100 Persen

Dari capaian masing-masing sub kegiatan pada kegiatan pada kegiatan ini maka capaian program mencapai 100 Persen

3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

Kegiatan ini bermaksud untuk menyerap aspirasi masyarakat baik melalui reses maupun melalui kunjungan kerja dalam daerah dengan capaian 91.47 %.

a) Kunjungan Kerja dalam Daerah, melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berjalan, terealisasi sebesar 68 Persen

b) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, melakukan penginputan pokok-pokok pikiran DPRD pada Anggaran induk maupun perubahan, terlaksana 100 Persen

c) Pelaksanaan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 Masa persidangan. Kegiatan ini berhasil menampung berbagai macam aspirasi masyarakat dan DPRD mampu melihat langsung kebutuhan masyarakat baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi.. Kegiatan reses ini telah dilaksanakan dan terealisasi 99 Persen

Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 97,78 Persen

4. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD;

Kegiatan teralisasi maksimal yakni target tercapai 100 persen. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi tugas-tugas DPRD yang termuat dalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

a) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, sudah dilaksanakan dengan realisasi 100 persen

b) Penyusunan Laporan KinerjaDPRD, telah dilaksanakan terealisasi 100 Persen

c) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, telah dilaksanakan terealisasi 100 Persen

d) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, sudah dilaksanakan dengan realisasi 100 persen

Dari akumulasi ketercapaian sub-sub kegiatan maka kegiatan ini tercapai sebesar 100 Persen

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kegiatan selama tahun anggaran 2023, tidak terdapat kegiatan yang melebihi target.

2.1.1 Hasil pelaksanaan Renja Sekretriat DPRD tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Manggarai Timur Triwulan IV
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur
Periode Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

Persentase capaian fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
3	7		8	9			12 = 8 / 7	
	K	RP	RP	RP	RP	RP	K	RP

			24.335.780.946	**5.827.470.040**	**3.694.006.661**	**4.948.182.235**	**7.784.596.153**		**91,45**
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**100**	**Persen**	**19.781.681.546**	**5.108.530.040**	**3.503.536.661**	**4.236.543.293**	**5.416.114.770**		**92,33**
Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100**	**Persen**	**69.708.000**	**65.040.000**		**-**	**-**		**33**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	1	dokumen	65.708.000	65.040.000					**98,98**
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500.000						
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			500.000						

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			500.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	500.000						-
	1	dokumen							
	1	dokumen							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	1.500.000						-
	4	dokumen							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100**	**Persen**	**2.010.857.460**	**579.554.653**	**337.983.663**	**304.858.149**	**430.532.254**		**82,20**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	1.414.215.510	**437.804.653**	268.233.663	248.458.149	234.812.212		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bulan	593.442.200	**141.750.000**	**69.750.000**	56.400.000	195.720.042		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	dokumen	3.199.750				-		
Administrasi Barang Milik Daerah	**100**	**Persen**	**2.500.000**						

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100**	**persen**	**424.969.050**	**16.342.400**	**68.603.300**	**81.006.341**	**242.622.098**		**96,14**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	buah	14.999.000				14.999.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1450	buah	85.000.000				85.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120	buku	61.736.050				51.614.250		
	120.000	lembar							
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	5.000.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	laporan	258.234.000	**16.342.400**	68.603.300	81.006.341	91.008.848		
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya									-
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya									-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100**	**Persen**	**131.897.300**	**17.278.777**	**4.489.759**	**13.469.277**	**73.044.395**		**82,10**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	surat	17.499.800				17.404.500		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	104.402.000	**17.278.777**	4.489.759	13.469.277	45.644.395		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan					-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	9.995.500				9.995.500		
Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100**	**Persen**	**954.745.000**	**12.974.000**	**121.196.159**	**281.093.318**	**371.896.670**		**82,45**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	unit	125.700.000	**10.610.000**	21.990.000	17.000.000	67.760.250		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	unit	66.620.000		14.866.159	6.294.318	39.470.650		
Pemeliharaan peralatan mesin lainnya			14.920.000				14.100.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	722.495.000	-	84.340.000	257.799.000	228.611.000		
	3	unit							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	unit	25.010.000	**2.364.000**			21.954.770		
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**100**	**Persen**	**12.631.264.736**	**3.875.896.710**	**2.160.803.780**	**2.957.061.408**	**3.133.062.394**		**96,01**
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14	bulan	12.061.264.736	**3.875.896.710**	1.903.253.780	2.951.061.408	2.891.957.294		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	pasang	480.000.000		254.550.000		223.500.000		

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	30	orang	90.000.000		3.000.000	6.000.000	17.605.100		
Layanan Administrasi DPRD	**100**	**Persen**	**3.555.740.000**	**541.443.500**	**810.460.000**	**599.054.800**	**1.164.956.959**		**87,63**
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	178	laporan	2.775.740.000	281.443.500	680.460.000	489.054.800	1.034.956.959		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	bulan	780.000.000	260.000.000	130.000.000	110.000.000	130.000.000		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**100**	**Persen**	**4.554.099.400**	**718.940.000**	**190.470.000**	**711.638.942**	**2.368.481.383**		**87,60**
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**100**	**Persen**	**1.042.807.600**	**-**	**-**	**509.178.942**	**339.098.775**		**81,35**
Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	1	dokumen	2.000.000				-		-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7	dokumen	1.039.807.600			509.178.942	339.098.775		
Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-undangan	2	dokumen	500.000				-		
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2	dokumen	500.000				-		

Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	dokumen	,				-		
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**100**	**persen**	**199.500.000**	**-**	**-**	**9.700.000**	**180.435.000**		**95,31**
Pembahasan KUA dan PPAS	6	dokumen	67.500.000				67.435.000		99,90
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	dokumen	60.000.000				58.500.000		97,50
Pembahasan APBD	6	dokumen	20.000.000				18.500.000		92,5
Pembahasan APBD Perubahan	6	dokumen	20.000.000				16.000.000		80,00
Pembahasan Laporan Semester	4	laporan	2.000.000				-		
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	dokumen	30.000.000			9.700.000	20.000.000		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**100**	**Pesen**	**183.994.800**	**-**	**76.035.000**	**25.450.000**	**7.263.100**		**59,10**
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	1	laporan	2.500.000				2.500.000	2.500.000	

Pemerintahan dan Hukum	4	laporan							
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 4	laporan laporan	2.500.000				-	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan rakyat	1	laporan	2.500.000				-		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 1	laporan laporan	2.500.000				-		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	laporan	2.500.000				-		
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK	1	laporan	25.500.000				-		
Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	laporan	2.500.000				-		
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	dokumen	143.494.800		76.035.000	25.450.000	4.763.100		

Peningkatan Kapasitas DPRD	**100**	**Persen**	**863.780.000**	**-**	**-**	**-**	**688.424.508**		**79,70**
Pendalaman Tugas DPRD	30	orang	853.280.000				681.424.508		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	laporan	7.500.000				7.000.000		
Penyusunan Program Kerja DPRD	1	dokumen	3.000.000				-		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**100**	**Persen**	**1.917.917.000**	**718.940.000**	**114.435.000**	**77.810.000**	**901.660.000**	**90,43%**	**94,52**
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	420	kali	467.125.000		114.435.000	77.810.000	193.645.000		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2	dokumen	3.592.000				-		
Pelaksanaan Reses	90	laporan	1.447.200.000	718.940.000			708.015.000		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			**2.000.000**						
Pengawasan Kode Etik DPRD			2.000.000				-	-	

Fasilitasi Tugas DPRD	**100**	**Persen**	**344.100.000**	**-**	**-**	**89.500.000**	**251.600.000**	**100%**	**99,13**
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	55	dokumen	323.000.000			71.600.000	250.600.000		
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1	laporan	1.350.000				-		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5	dokumen	1.750.000				1.000.000		
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	55	dokumen	18.000.000			17.900.000	-		
Rata-rata capaian kinerja SASARAN (%);								**0,00%**	**91,45%**
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%);								**90**	
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%);								**76**	

Capaian Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan pada tahun 2024 senilai 87,60 % dengan rincian sebagai berikut

Fungsi Legislasi

Target Dokumen yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 13 (tiga belas) Dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

1) Target Jumlah dokumen Naskah Akademik yang tersusun sebanyak 2 (dua) dokumen dengan capaian 50 % atau hanya 1 dokumen yang dihasilkan karena tidak terlaksananya fasilitasi penyusunan oleh kemenkumham Provinsi NTT sebagai pihak yang berwenang;
2) *Target* Jumlah perda yang dibahas sebanyak 7 (tujuh) dokumen, capaian selama tahun 2023 sebagai berikut
    - *Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah sudah selesai*
    - *Ranperda Pertanggungjawaban APBD sudah selesai*
    - *Perubahan APBD 2024 sudah ditetapkan*
    - *APBD 2024 sudah ditetapkan*
    - *Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagian Hukum dilakukan pembahasan pada tingkat Bapemperda tapi tidak sampai menghasilkan PERDA*
    - *Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD pembahasan pada tingkat Bapemperda tapi tidak sampai menghasilkan PERDA*
    - *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLHD pembahasan pada tingkat Bapemperda tapi tidak sampai menghasilkan PERDA*

    Dari target dokumen sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang terealisasi adalah 4 (empat) dokumen
3) Target Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah 1 (satu) dokumen. Dokumen yang dimaksud adaah Perda inisiatif yakni Ranperda PDAM. Kegiatan ini tidak terlaksana karena dampak dari tidak dilaksanakanya penyusunan Naskah Akademik
4) *Target* Jumlah dokumen hasil kajian perundang-undangan 2 (dua) dokumen, dokumen yang dihasilkan hanya 1 (satu) dokumen yakni *Pengelolaan Keuangan Daerah*
5) *Target* Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang tersusun 1 (satu) dokumen, penyusunan revisi tatib DPRD dilaksanakan pada waktu peroses Pemilihan Wakil Bupati yang dilaksanakan di DPRD

Secara umum capaian Fungsi legislasi adalah 61,54 % dari target 100 % pada tahun 2024

Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran telah dilaksanakan tepat waktu. Ada 6 (enam) kegiatan yang merupakan tahapan pengangaran, semuanya sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Maka capaian pada Fungsi Anggaran adalan sebesar 100 Persen.

Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan DPRD adalah bagian yang tidak terpisahkan antara Legislatif dan Pemerintah sebgai alat pengendali jalannya roda pemerintahan. Kegiatan pengawasan dilksanakan dengan bebagai cara yakni melalui rapat kerja khusus yang membahas capaian target beberapa OPD maupun pada saat pembahasan KUA PPAS serta dengan melakukan kunjungan lapangan.

Target dokumen pengawasan yakni sebanyak 20 (dua Puluh) dokumen dengan capaian 100 %

2.1.2 Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD hinggga tahun 2023 adalah seperti tergambar pada table 2.1 di atas. Capaian Renstra yakni Capaian fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebesar 85,06 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Adapun Analisis Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD belum memiliki indikator kinerja yang ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2. Penentuan Indikator kinerja Sekretariat DPRD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD (Pasal 2 ayat 1) dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 2 ayat 2)
3. Dukungan Sekretariat DPRD dalam tugas pelayanan terhadap Tugas pokok dan Fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah yakni
   - Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
   - Fungsi Anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati
   - Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Pertuaran Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pelaksanaan Perda APBD
4. Terdapat 3 (tiga) fungsi DPRD selaku perwakilan rakyat ini kemudian menjadi tolak ukur bagi Sekretariat DPRD dalam menentukan indikator kinerja yang merupaka standar pelayanan pada Sekretariat DPRD. Indikator tersebut adalah
   - ❖ Presentase Capaian Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
   - ❖ Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/ Kota
   - ❖ Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD

5. Indikator ini merupakan indikator kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan RPJMD Perubahan tahun 2021-2024, yang berbeda dengan indikator kinerja RPJMD tahun 2019 – 2024 sebelum perubahan.

   Maka perubahannya akan terlihat pada Tabel T-C. 30

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretriat DPRD

TABEL T-C. 30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		ANALISIS CATATAN
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
A.	**Optimalnya Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan**											
	Persentase capaian fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan		100	100	100	100	100	85,06	0	100	100	Realisasi sampai Juli 2022 ada 3 Perda yang ditetapkan
B.	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**											
	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	88,58	48,28	100	100	Realisasi per Juli 2023
	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	100	100	100	100	100	100	89,05	51,27	100	100	Realisasi per Juli 2021

2.3 Isu-isu Penting Peenyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD

Berdasarkan Peraturan Buapati Manggarai Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD (Pasal 2 ayat 1) dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Pasal 2 ayat 2)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekretaria DPRD Kabupaten Manggarai Timur menemui berbagai hambatan dan permasalahan, baik yang dating dari dalam maupun dari luar, baik itu teknis maupusn social.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas Pelayanan Administrasi

   Dalam upaya meningkatkan pelayanan Administrasi, Sekretariat DPRD mengalami kendala dalam meningkatkan pelayanan karena keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya yang lain

2. Pelayanan Administrasi Keuangan

   Masih terdapat berbagai kendala dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disebabkan oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dijalankan secara benar

- Peluang:

1. PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dijadikan landasan pijak bagi daerah khususnya Sekretariat DPRD untuk terus meningkatkan pelayanan Keuangan maupun yang bersifat administratif Lembaga DPRD dengan ditindaklanjuti melalui berbagai peraturan daerah atau peraturan Bupati sehingga apa yang menjadi hak Pimpinan dan anggota DPRD dapat di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Kantor Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD yang sudah digunakan serta beberapa fasilitas penunjang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

- Isu-isu strategis

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah tangga dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan, dan c. belannja rumah tangga.

Kendaraan dinas jabatan merupakan sarana untuk memperlancar ruang gerak Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Usia kendaraan jabatan yang sudah memasuki 7 tahun, berdampak pada terganggunya mobilitas pimpinan DPRD karena menurunnya performa kendaraan ketika mengunjungi desa-desa di pelosok Manggarai Timur. Maka dari itu, usulan untuk mengadakan kendaraan jabatan baru menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

1. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 mempunyai sekretariat Fraksi.
2. Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi
3. Untuk pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD dan pasal 34 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagi berikut :

    1. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli
    2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
        a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata satu (S1) dengan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun, Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) Tahun ;

b. Menguasai bidang pemerintah; dan

c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Dengan merujuk pada beberapa Peraturan tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

1. Belum tersedianya ruangan untuk sekretariat fraksi dan sarana prasarananya
2. Belum tersedianya ruang arsip khusus dokumen-dokumen penting, seperti Perda APBD, Perda Pertanggungjawaban APBD, Buku risalah rapat paripurna dan sebagainya.
3. Perlunya mengganti kendaraan jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur, untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawasan lapangan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.4.1. Rancangan Awal RKPD tahun 2024 disusun berdasarkan analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD terutama berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada DPRD untuk mendukung tugas dan fungsinya selaku perwakilan rakyat tingkat daerah. Pada tahapp ini Sekretariat DPRD membuat Rencana Kerja Tahunan DPRD yang menyajikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, Sekretariat DPRD dapat memastikan bahwa kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dialokasikan pada program prioritas DPRD yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi standar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD beberapa kegiatan akan muncul karena perubahan regulasi pada tahun berjalan atau karena situasi yang mendesak, maka perubahan ini akan disesuaikan pada RKPD Perubahan tahun berjalan.

2.4.2. Proses tersebut di atas dilakukan didasarkan pada analisis kebutuhan yang menjadi prioritas serta adanya perubahan regulasi pada tahun berjalan yang diharuskan tertuang dalam program dan kegiatan DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selaku wakil rakyat.

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Pada Rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan pada rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Semuanya telah sesuai sampai tahap penyusunan renja perangkat daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten manggarai Timur.

Review ini akan disajikan pada Tabel T-C.31 berikut

Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Manggarai Timur

Nama Perangkat daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

RANCANGAN AWAL RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SEKRETARIAT DPRD				**22.367.420.000**				**19.966.868.516**	
I	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SETWAN**	**Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**19.167.420.000**	**SETWAN**	**Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**16.526.190.616**	
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SETWAN**	**Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah**	100 ,	**4.500.000**	**SETWAN**	**Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah**	100 Persen	**30.200.000**	
		SETWAN	**INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENJA**	91 - 100 Persen		SETWAN	**INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENJA**	91 - 100 Persen		

		SETWAN	**INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENSTRA**	91 - 100	Persen		SETWAN	**INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENSTRA**	91 - 100	Persen	
		SETWAN	**Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**	100	Persen		SETWAN	**Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**	100	Persen	
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	SETWAN	Jumlah dokumen Renstra Perangkat daerah,		Dokumen		SETWAN	Jumlah dokumen Renstra Perangkat daerah,		Dokumen	
		SETWAN	Jumlah dokumen pelaksanaan Forum Perangkat Daerah,		Dokumen		SETWAN	Jumlah dokumen pelaksanaan Forum Perangkat Daerah,		Dokumen	
		SETWAN	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah,	2	Dokumen	1.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah,	2	Dokumen	19.680.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	SETWAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat daerah	2	Dokumen	250.000	SETWAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat daerah	2	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	SETWAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat daerah	1	Dokumen	250.000	SETWAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat daerah	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	SETWAN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat daerah	1	Dokumen	500.000	SETWAN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat daerah	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	SETWAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat daerah	1	Dokumen	500.000	SETWAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat daerah	1	Dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SETWAN	Jumlah Laporan LPPD	1	Laporan		SETWAN	Jumlah Laporan LPPD	1	Laporan	1.950.000
		SETWAN	Jumlah Laporan Lakip	1	Laporan	1.500.000	SETWAN	Jumlah Laporan Lakip	1	Laporan	1.950.000
		SETWAN	Jumlah Laporan LKPJ	1	Laporan		SETWAN	Jumlah Laporan LKPJ	1	Laporan	1.950.000
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	SETWAN	Jumlah Dokumen LAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI HASIL RENJA	4	Dokumen	500.000	SETWAN	Jumlah Dokumen LAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI HASIL RENJA	4	Dokumen	4.670.000
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**SETWAN**	**Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**30**	**Persen**	**1.786.530.000**	**SETWAN**	**Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**30**	**Persen**	**1.741.016.508**
	Penyediaaan gaji dan tunjangan ASN	SETWAN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	1.279.030.000	SETWAN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	1.279.028.828

	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	SETWAN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	505.000.000	SETWAN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	456.012.680	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/ trisemesteran / semesteran SKPD	SETWAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.500.000	SETWAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	5.975.000	
3.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**SETWAN**	**Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100	**Persen**	**3.200.000**	**SETWAN**	**Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100	**Persen**	-	
	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	SETWAN	Jumlah Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	3	Dokumen	3.200.000	SETWAN	Jumlah Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	3	Dokumen		
4.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**SETWAN**	**Presentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**302.000.000**	**SETWAN**	**Presentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**419.392.000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SETWAN	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Buah	15.000.000	SETWAN	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Buah	15.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Buah	50.000.000	SETWAN	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Buah		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	SETWAN	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100	Buah	50.000.000	SETWAN	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100	Buah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	SETWAN	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1450	Buah	50.000.000	SETWAN	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1450	Buah	90.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SETWAN	Jumlah Barang Cetakan	120	Buku	50.000.000	SETWAN	Jumlah Barang Cetakan	120	Buku	30.000.000	
		SETWAN	Jumlah Barang Penggandaan	120000	Lembar		SETWAN	Jumlah Barang Penggandaan	120000	Lembar	30.500.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SETWAN	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	336	Exemplar	10.000.000	SETWAN	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	336	Exemplar	6.960.000	
	Fasilitasi Kunjungan tamu	SETWAN				12.000.000						

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SETWAN	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Kali	65.000.000	SETWAN	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Kali	246.932.000	
5.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SETWAN**	**Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**917.431.680**	**SETWAN**	**Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	1.418.940.000	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	SETWAN	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	Unit	375.831.680	SETWAN	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	Unit	1.405.940.000	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	SETWAN	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	5	Unit	150.000.000	SETWAN	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan		Unit		
	Pengadaan mebel	SETWAN	Jumlah pengadaan mebel		Unit		SETWAN	Jumlah pengadaan mebel		Unit		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	SETWAN	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2	Unit	4.100.000	SETWAN	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2	Unit	13.000.000	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	SETWAN	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Gedung	65.000.000	SETWAN	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Gedung		
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	SETWAN	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Unit	262.500.000	SETWAN	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Unit		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	SETWAN	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Unit	60.000.000	SETWAN	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Unit		
6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SETWAN**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**214.621.800**	**SETWAN**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**217.274.772**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	SETWAN	Jumlah surat masuk dan surat keluar	600	Surat	6.000.000	SETWAN	Jumlah surat masuk dan surat keluar	600	Surat	6.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SETWAN	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	85.000.000	SETWAN	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	84.972.972	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	15.000.000	SETWAN	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	17.700.000	

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	SETWAN	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	108.621.800	SETWAN	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	108.601.800	
7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SETWAN**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**424.074.520**	**SETWAN**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**364.974.520**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	SETWAN	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kebdaraan dinas jabatan	3 Unit	238.778.160	SETWAN	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kebdaraan dinas jabatan	3 Unit	238.778.160	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	SETWAN	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11 Unit	88.296.360	SETWAN	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11 Unit	88.296.360	
	Pemeliharaan mebel	SETWAN	Jumlah pemeliharaan mebel	Unit	25.000.000	SETWAN	Jumlah pemeliharaan mebel	Unit		
	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	SETWAN	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Unit	30.000.000	SETWAN	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Unit		
	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	SETWAN	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	10.000.000	SETWAN	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	SETWAN	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	12.000.000	SETWAN	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	12.900.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	SETWAN	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	20.000.000	SETWAN	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit		

8.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**SETWAN**	**Prosentase ketercapaian Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100**	**Persen**	**11.170.775.000**	**SETWAN**	**Prosentase ketercapaian Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100**	**Persen**	**11.237.239.736**	
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	SETWAN	Jumlah penyediaan dokumen administrasi keuangan DPRD	14	Dokumen	10.830.775.000	SETWAN	Jumlah penyediaan dokumen administrasi keuangan DPRD	14	Dokumen	10.997.239.736	
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	SETWAN	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	120	Pasang	250.000.000	SETWAN	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	120	Pasang	150.000.000	
	Pelaksanaan medical check up DPRD	SETWAN	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	30	Orang	90.000.000	SETWAN	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	30	Orang	90.000.000	
9.	**Layanan Administrasi DPRD**	**SETWAN**	**Prosentase ketercapaian Layanan administrasi DPRD**	**100**	**Persen**	**4.344.287.000**	**SETWAN**	**Prosentase ketercapaian Layanan administrasi DPRD**	**100**	**Persen**	**1.097.153.080**	
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	SETWAN	Jumlah laporan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	150	Laporan	3.564.287.000	SETWAN	Jumlah laporan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	150	Laporan	499.264.000	
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	SETWAN	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	12	Bulan	780.000.000	SETWAN	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	12	Bulan	597.889.080	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPDR**	SETWAN	**Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD**	**100**	**Persen**	**3.200.000.000**	SETWAN	**Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD**	**100**	**Persen**	**3.440.677.900**	
1.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**SETWAN**	**Persentase terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100**	**Persen**	**656.000.000**	**SETWAN**	**Persentase terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100**	**Persen**	**622.802.080**	
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	SETWAN				2.000.000		Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	1	Dokumen	3.000.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SETWAN	Jumlah Perda yang dibahas	7	Perda	540.000.000	SETWAN	Jumlah Perda yang dibahas	7	Perda	341.652.080	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	SETWAN				4.000.000		Jumlah dokumen hasil kajian Perundang-undangan	2	Dokumen	7.000.000	
	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan dan/atau Naskah	SETWAN				100.000.000		Jumlah dokumen Naskah Akademik yang tersusun	2	Dokumen	267.400.000	

	Akademik									
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	SETWAN			10.000.000		Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang tersusun	1 Dokumen	3.750.000	
2.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**SETWAN**	**Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100 Persen**	**256.000.000**	**SETWAN**	**Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100 Persen**	**228.889.080**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan KUA dan PPAS	6 Dokumen	90.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan KUA dan PPAS	6 Dokumen	115.889.080	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	6 Dokumen	30.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	6 Dokumen	58.000.000	
	Pembahasan APBD	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan APBD	6 Dokumen	15.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan APBD	6 Dokumen	12.500.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan APBD Perubahan	6 Dokumen	15.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan APBD Perubahan	6 Dokumen	12.500.000	
	Pembahasan Laporan Semester	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan Laporan Semester	4 Dokumen	17.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan Laporan Semester	4 Dokumen	7.500.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	89.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	22.500.000	
3.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**SETWAN**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100 Persen**	**128.000.000**	**SETWAN**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100 Persen**	**451.049.080**	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	SETWAN			15.000.000	SETWAN	Jumlah Laporan Rapat Kerja DPRD terkait bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	10.000.000	
		SETWAN				SETWAN	Jumlah Laporan Pansus DPRD terkaitbidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	35.155.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SETWAN			15.000.000	SETWAN	Jumlah Laporan Rapat Kerja DPRD terkait bidang Infrastruktur	4 Laporan	10.000.000	
						SETWAN	Jumlah Laporan Pansus DPRD terkait bidang Infrastruktur	1 Laporan	35.155.000	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SETWAN			6.000.000	SETWAN	Jumlah Laporan Pansus DPRD terkait bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	40.155.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SETWAN			15.000.000	SETWAN	Jumlah Laporan Rapat Kerja DPRD terkait bidang Perekonomian	4 Laporan	10.000.000	
		SETWAN				SETWAN	Jumlah Laporan Pansus DPRD terkait bidang Perekonomian	1 Laporan	35.155.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SETWAN			6.000.000	SETWAN	Jumlah Laporan Pansus DPRD terkait bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	40.155.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SETWAN	Jumlah Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tersedia	1 Dokumen	15.000.000	SETWAN	Jumlah Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tersedia	1 Dokumen	44.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	SETWAN			6.000.000	SETWAN	Jumlah laporan pengawasan penggunaan anggaran	1 Laporan	40.155.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	SETWAN	Jumlah Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tersedia	1 Dokumen	50.000.000	SETWAN	Jumlah Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tersedia	1 Dokumen	151.119.080	
4.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**SETWAN**	**Persentase Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100 Persen**	**564.000.000**	**SETWAN**	**Persentase Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100 Persen**	**511.760.000**	
	Bimbingan Teknis DPRD	SETWAN	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD	90 Laporan	418.000.000	SETWAN	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD	90 Laporan	509.100.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				93000000					
	Penyusunan Program Kerja DPRD	SETWAN	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	1 Dokumen	53.000.000	SETWAN	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	1 Dokumen	2.660.000	
5.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**SETWAN**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100 Persen**	**1.434.000.000**	**SETWAN**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100 Persen**	**1.180.797.580**	

	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	SETWAN	Jumlah kunjungan kerja DPRD yang dilaksanakan	360	Kali	510.000.000	SETWAN	Jumlah kunjungan kerja DPRD yang dilaksanakan	360	Kali	361.954.080	
	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	SETWAN	Jumlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang tersusun	2	Dokumen	24.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang tersusun	2	Dokumen	3.128.500	
	Pelaksanaan Reses	SETWAN	Jumlah pelaksanaan reses	90	Laporan	900.000.000	SETWAN	Jumlah pelaksanaan reses	90	Laporan	815.715.000	
6.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**SETWAN**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasinya Tugas DPRD**	**100**	**Persen**	**114.000.000**	**SETWAN**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasinya Tugas DPRD**	**100**	**Persen**	**445.380.080**	
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	SETWAN	Jumlah dokumen risalah rapat paripurna yang tersusun	55	Dokumen	100.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen risalah rapat paripurna yang tersusun	55	Dokumen	417.880.080	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	SETWAN	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	1	Laporan	2.000.000	SETWAN	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	1	Laporan	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SETWAN	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	5	Dokumen	2.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	5	Dokumen	7.500.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SETWAN	Jumlah dokumen fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	55	Dokumen	10.000.000	SETWAN	Jumlah dokumen fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	55	Dokumen	18.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Sekretariat DPRD Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak secara langsung diterima oleh sekretariat DPRD, namun itu tertuang dalam Pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat dan kemudian menjadi perhatian Perangkat Daerah terkait.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 tersaji dalam Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Manggarai Timur

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2024	CATATAN
1	2	3	4	5	6	8
		SEKRETARIAT DEWAN				
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD***	**100 Persen**	**100 Persen**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*ersentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	-
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	4 Laporan	-
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	13 Orang/bulan	-
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	4 Laporan	-
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	4 Paket	-
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5800 Paket	2 Paket	-
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	480480 Paket	2 Paket	-
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	3 Unit	-
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	10 Unit	-
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	18 Unit	-
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4 Unit	-
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	4 Unit	-

	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Prosentase ketercapaian Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	150 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	-
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	480 Paket	180 Paket	-
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120 Orang	30 Orang	-
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase ketercapaian Layanan administrasi DPRD*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	600 Laporan	66 Laporan	-
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	-
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Presentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD***	**100 Persen**	**100 Persen**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 Dokumen	6 Dokumen	-
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	7 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	2 Dokumen	-
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS				

			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	24 Dokumen	4 Dokumen	-
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24 Dokumen	4 Dokumen	-
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24 Dokumen	4 Dokumen	-
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	24 Dokumen	4 Dokumen	-
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	16 Dokumen	2 Dokumen	-
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16 Dokumen	2 Dokumen	-
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	2 Laporan	-
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran				

			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	25 Dokumen	2 Dokumen	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	30 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	11 Dokumen	3 Dokumen	-
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD				
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1170 Laporan	240 Laporan	-
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	6 Dokumen	12 Dokumen	-
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses				
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	360 Dokumen	30 Dokumen	-
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	20 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Terlaksananya Fasilitasinya Tugas DPRD*	100 Persen	100 Persen	-
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	275 Dokumen	60 Dokumen	-
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				

			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	1 Laporan	-
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	11 Dokumen	3 Dokumen	-
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	71 Dokumen	60 Dokumen	-
	J U M L A H					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, yang diturunkan pada prioritas pembangunan provinsi yakni Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing selanjutnya prioritas pembanguann kabupaten dimana Sekretariat DPRD memiliki prioritas pembangunan kabupaten yakni Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, mencerminkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD maupun kepada pihak lain yang merupakan mitra lembaga DPRD secara optimal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra SKPD

- Tujuan : agar Sekretariat DPRD dapat melaksanakan rencana kerja sesuaian dengan target yang akan dicapai pada satu tahun anggaran.

- Sasaran: Program dan kegiatan pada sekretariat DPRD diproritaskan pada pemenuhan kebutuhan Anggota DPRD serta kegiatan lain sebagai penunjang pada Sekretariat DPRD

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD sesuai Perda No. 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 51 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, untuk menjawab tugas pokok dan fungsi tersebut, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan yang ada, diharapkan mampu mewujudkan tugas pelayanan kepada lembaga DPRD dan tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

- Jumlah Program dan Kegiatan

  Jumlah Program sebanyak : 2 Program

  Jumlah Kegiatan sebanyak : 16 Kegiatan

  Jumlah Sub Kegiatan sebanyak: 62 Sub Kegiatan

- Sifat Penyebaran Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijalankan sebagian besar terpusat di sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur dan beberapa sub kegiatan yang dilakukan di luar sekretariat yakni :

  1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait pelaksanaan Asistensi Ranperda di Kupang
  2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan termasuk sosialisasi Ranperda diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.
  3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dilaksanakan di wilayah kecamatan yang menjadi sampling pada saat proses assessment dari Tim Kemenkumham terkait pengumpulan data untuk keperluan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif.
  4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan di Jakarta
  5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dilaksanakan pada desa-desa dalam Daerah pemilihan.
  6. Kegiatan Reses Anggota DPRD yang dilaksanakan pada Dapil masing-masing Anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap masa persidangan.
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Rumah Sakit (dalam negeri) di seluruh Indonesia.

- Kebutuhan dana / pagu indikatif pada Sekretariat DPRD bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 2 (dua) program yakni:

  1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

     Program ini merupakan program khusus untuk Sekretariat DPRD dimana Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini sama dengan kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah lain. Yang membedakan adalah kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Kegiatan Layanan Administrasi DPRD yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi DPRD yang tidak relevan pada perangkat daerah lain.

     ***Pagu indikatif untuk program ini sebesar Rp* 19.147.420.000,-**

     a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 4.500.000,-

     b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 1.786.530.000,-

     c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah senilai Rp 3.200.000,-

     d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 302.000.000,-

e. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp* 917.431.680*,-*

f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp* 214.621.800*,-*

g. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp* 404.074.520*,-*

h. *Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sebesar Rp* 11.170.775.000,-

i. *Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sebesar Rp* 4.344.287.000*,-*

2. ***Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp.* 3.200.000.000**

a. *Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar Rp* 656.000.000*,-*

b. *Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar Rp* 256.000.000*,-*

c. *Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp* 128.000.000,-

d. *Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp* 564.000.000*,-*

e. *Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar Rp* 1.434.000.000*,-*

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar Rp. 20.000.000,-

g. *Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sebesar Rp* 114.000.000*,-*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026 akan tersaji pada Tabel T-C.33

Tabel T-C.33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	8	9	12	13	14	15	16	17
	SEKRETARIAT DEWAN				**22.367.420.000,00**					**0,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**22.347.420.000,00**					**0,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**22.347.420.000,00**					**0,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**19.147.420.000,00**				**-**	**0,00**	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen 100 Persen	-	4.500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen 100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	250.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	3 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	8 Laporan	500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	8 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen 100 Persen	-	1.786.530.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen 100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.279.030.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	14 Orang/bulan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	12 Dokumen	505.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	4 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	3.200.000,	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3 Laporan	3.20 0.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	3 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	302.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	10 Paket	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5 Paket	50.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	3 Paket	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	110 Paket	100 Paket	50.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	10 Paket	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	240 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	120 Paket	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	672 Dokumen	336 Dokumen	10.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	336 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	10 Laporan	65.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	10 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen	-	917.431.680,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	375.831.680,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	150.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Referm oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	5 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	2 Unit	4.100.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	9 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	65.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	262.500.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	60.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik,	-	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik				
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-	214.621.800,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	600 Laporan	6.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	600 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	108.621.800,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-	404.074.520,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	4 Unit	238.778.160,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	3 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	11 Unit	88.296.360,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	11 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	30 Unit	25.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	30 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4 Unit	30.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	4 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik,	-	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik				
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4 Unit	12.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	4 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	100 Persen	-	11.170.775.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	28 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	10.830.775.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	14 Orang/Bulan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										

		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	270 Paket	120 Paket	250.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	150 Paket	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	60 Orang	30 Orang	90.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	30 Orang	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	100 Persen	-	4.344.287.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	300 Laporan	66 Laporan	3.564.287.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	150 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD										
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	24 Paket	48 Paket	780.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Paket	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**	**-**	**-**	**3.200.000.000,00**				**-**	**0,00**	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	100 Persen	-	656.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah										

		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	7 Dokumen	540.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	7 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD										
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	100 Persen	-	256.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12 Dokumen	6 Dokumen	90.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	6 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	6 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD										

		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	12 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	6 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	12 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	6 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	8 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8 Dokumen	4 Dokumen	89.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	100 Persen	-	128.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	5 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	5 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat										

		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	5 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah										
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	24 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	100 Persen	-	564.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD										

		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	180 Dokumen	1 Dokumen	418.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	90 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	3 Dokumen	93.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	50 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	100 Persen	-	1.434.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	450 Laporan	300 Laporan	510.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	150 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses										

		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	180 Dokumen	90 Dokumen	900.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	90 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	100 Persen	-	20.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD										
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	20 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	10 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	100 Persen	-	28.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah										
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi										
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen	50 Dokumen	25.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	50 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	100 Persen	-	114.000.000,00	-	4.Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	110 Dokumen	55 Dokumen	100.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	55 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	3 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	16 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta	-	8 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN

							Stabilitas Politik				
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-	20.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
2	3	4	5	8	9	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4 Unit	20.000.000,00	-	4. Reformasi birokrasi P4. Reform oamsi Birokrasi Melalui Pen ingkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-	4 Unit	0,00	SEKRETARIAT DEWAN
J U M L A H					**22.367.420.000,00**					**0,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD telah tersaji dalam Renja Perangkat Daerah diikuti jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Pendanaan perangkat daerah tidak terlepas dari analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD tahun 2025.

Jumlah seluruh Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : Jumlah Program sebanyak 2 Program, Jumlah Kegiatan sebanyak 16 Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 62 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24,631,494,382,- (Dua Puluh empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). NIlai Total pendanaan tersaji pada TC.33.

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Beberapa hal menjadi perhatian terkait sub kegiatan yang akan mengakomodir kegiatan di DPRD pada tahun 2024. Dengan berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 mengalami perubahan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas Pelayanannya Sekretariat DPRD berpedoman pada:

- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggita DPRD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 tahun 20219 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024
- Peraturan Bupati Manggarai Timur Perda No. 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

c. Rencana Tindak Lanjut

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 mengalami perubahan sesuai regulasi terbaru yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026 yang merupakan dasar dalam penentuan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2021.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (RENJA) sebagai bahan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025.

Borong, …….. 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Thobias Suman, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650518 199703 1 004